

ANALISA MODAL SOSIAL MASYARAKAT DESA
(STUDI KASUS DI NAGARI KOLOK, KEC. BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO)

Tesis

Sipisis

Oleh

Siti Latifah FRS
97206015



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2000

**Analisa Modal Sosial Masyarakat Desa
(Studi Kasus di Nagari Kolok, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto)**

oleh : Siti Latifah FRS

(Dibawah bimbingan Syafrudin Karimi dan Sofyardi)

RINGKASAN

Konsep modal sosial mengandung arti struktur hubungan menjadi modal dalam pencapaian tujuan hidup, dimana struktur hubungan ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang didasari dengan rasa saling mempercayai. Rasa saling percaya ini bisa terdapat pada kelompok sosial terkecil seperti keluarga sampai terbesar seperti negara. Sedangkan kemampuan bekerjasama bergantung pada sampai sejauh mana masyarakat memiliki persamaan norma dan nilai-nilai. Modal sosial ini tidak dapat diperoleh oleh individu-individu yang bertindak sendiri-sendiri melainkan didasarkan pada keumuman nilai-nilai sosial diantara kita. Dan modal sosial ini dapat meningkatkan produktifitas masyarakat.

Sementara itu, kebijakan pembangunan yang kita laksanakan selama ini adalah kebijakan pembangunan yang sentralistik dan tidak mengenal diversifikasi, menyebabkan terkuburnya potensi-potensi yang ada di daerah. Kebijakan tersebut pada akhirnya ditujukan pada obyek yang menjadi sasarannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa hampir tidak ada partisipasi dari masyarakat, khususnya mereka yang berada pada lapisan bawah, untuk ikut serta dalam merencanakan dan menentukan kebijakan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat, sekalipun dalam bentuk partisipasi yang sangat sederhana.

L PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan perkapita tidak bisa dijadikan ukuran berkurangnya kesenjangan dan terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat. Bahkan ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi selama ini selalu diikuti dengan kesenjangan pendapatan yang semakin besar, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja.

Hal ini menyebabkan timbulnya masalah utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu pengangguran, ketimpangan baik antar golongan penduduk, antar sektor maupun antar daerah, serta kemiskinan. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga perlu penanganan yang responsif dan terpadu baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Kecenderungan ini terjadi, khususnya di Indonesia karena kebijakan-kebijakan pembangunan di hampir semua aspek kehidupan masyarakat masih didasarkan pada pola Top-Down. Dalam arti bahwa segala sesuatu baik yang menyangkut perencanaan, penentuan dan pelaksanaan kebijakan ditangani oleh pemerintah. Kondisi yang demikian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berada posisi yang sangat menentukan dalam membuat kebijakannya dengan pengaruhnya yang sangat kuat, karena mereka tidak hanya memiliki kemampuan profesional untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga karena menguasai informasi, serta kemampuan untuk menentukan tindakan masyarakat dalam menanggapi keputusan-keputusannya.

Kebijakan tersebut pada akhirnya ditujukan pada objek yang menjadi sasarannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa hampir tidak ada partisipasi dari masyarakat, khususnya mereka yang berada pada lapisan bawah, untuk ikut serta dalam merencanakan dan menentukan kebijakan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat, sekalipun dalam bentuk partisipasi yang paling sederhana.

Pelaksanaan model-model kebijakan yang demikian tersebut tidak jarang menghasilkan program-program pembangunan yang bukan hanya mengabaikan, tetapi juga menurunkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi melalui inisiatif lokal.

Untuk itu, dalam rangka mempercepat dan pemeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, perlu ditingkatkan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara yang terpadu baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pembangunan wilayah. Menurut Batten dalam Purnamawaty (1996), bahwa pembangunan merupakan suatu proses di mana orang atau masyarakat desa, mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembangunan perlu mendapat dukungan penuh dari masyarakat agar terjadi koordinasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Proses pembangunan juga harus memperhatikan usulan dari bawah (bottom up) sehingga keterlibatan masyarakat dapat membawa perbaikan yang mendasar bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modal sosial masyarakat Nagari Kolok berada pada taraf baik (52.05%), dimana:

Hasil yang di capai dari indikator variabel adat-istiadat sebesar 71.73% yang berada pada taraf baik. Ini berarti masyarakat Nagari Kolok belum terpengaruh mendalam oleh arus modernisasi, mereka masih mempunyai sikap hidup yang mengandung kesadaran tinggi terhadap adat. Kaidah, petunjuk, larangan yang terdapat dalam adat masih mempunyai kekuatan mengikat dan masih diindahkan oleh masyarakat.

Hasil yang dicapai untuk indikator variabel kelembagaan ini sebesar 37.66% yang berada pada taraf tidak baik. Ini berarti lembaga yang ada belum dapat sepenuhnya menjadi motor penggerak pembangunan. Jika dilihat dari jumlah lembaga yang ada juga belum memadai, termasuk belum terdapatnya KUD. Dari segi pembinaan lembaga terhadap anggotanya juga masih rendah disebabkan juga karena rendahnya dukungan baik moril maupun materiil sebagai akibat dari rendahnya mental pelaksana/pihak pendukung, sebagai akibat dari belum terwujudnya 'clean government'.

Hasil yang dicapai dari variabel swadaya dan gotong-royong sebesar 34.62% yang berada pada taraf tidak baik disebabkan karena intervensi pemerintah yang terlalu besar sehingga inisiatif dan dinamika masyarakat desa tidak dapat tumbuh dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 1996. Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Alwi, Aidit dkk. 1986. Pembangunan Politik : Beberapa Aspek Perubahan Sosial Ekonomi. Liberty. Yogyakarta.
- Berry, David. 1982. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Rajawali. Jakarta.
- Coleman, James. 1990. Foundations of Social Theory. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England.
- Damsar. 1997. Sosiologi Ekonomi. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Depdiknas. 1995. Corak dan Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Pedesaan : Studi Tentang Kewiraswastaan Pada Masyarakat di Plered. Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jakarta.
- 1998. Pola Pengasuhan Anak Secara Tradisional Daerah Sumatera Barat. Depdikbud. Jakarta.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Elfindri. 1998. Pembangunan SDM Secara Holistik. Pemda Tk. I. Padang.
- Fukuyama, Francis. 1995. Trust. The Social Vertues and The Creation of Prosperity. The Free Press. New York.
- Faried, Wijaya. 1992. Ekonomi Makro. BPFE UGM. Yogyakarta.